



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 58-66  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Kebijakan Publik dan Politik Hukum dalam Administrasi Pemerintahan

Akmal Priambodo<sup>1\*</sup>, Husein Satria<sup>2</sup>, Agestanio Yoniv Andana<sup>3</sup>, Siti Arikah Nur Azizah<sup>4</sup>, Muhammad Abrar Dwicofanny<sup>5</sup>, Bagas Setyo Anggoro<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
email [c100230149@student.ums.ac.id](mailto:c100230149@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>

### Article Info :

Received:  
19-10-2025  
Revised:  
27-11-2025  
Accepted:  
20-12-2025

### Abstract

*This article examines the relationship between public policy and legal politics in the context of government administration, focusing on their role in shaping governance quality and administrative effectiveness. Public policy is understood as a political and legal instrument that reflects state choices in regulating power, public interests, and institutional authority. Legal politics provides normative direction that determines how policies are formulated, implemented, and enforced within administrative practices. The study highlights that government administration functions not merely as a technical executor of policy but as a strategic arena where law, politics, and bureaucratic capacity interact. Through an analytical discussion, the article demonstrates that inconsistencies between legal frameworks and administrative implementation often lead to inefficiencies, reduced public trust, and weakened policy outcomes. Contemporary challenges such as decentralization, digital governance, environmental sustainability, and social justice demand innovative policy approaches supported by coherent legal orientation. The findings emphasize that effective government administration requires adaptive legal politics, strong institutional coordination, and a commitment to democratic values. Ultimately, the sustainability of public governance depends on the state's ability to integrate public policy objectives with a responsive and accountable administrative system.*

**Keywords:** public policy, legal politics, government administration, governance, administrative law.

### Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara kebijakan publik dan politik hukum dalam konteks administrasi pemerintahan, dengan fokus pada peran keduanya dalam membentuk kualitas tata kelola dan efektivitas administratif. Kebijakan publik dipahami sebagai alat politik dan hukum yang mencerminkan pilihan negara dalam mengatur kekuasaan, kepentingan publik, dan otoritas institusional. Politik hukum memberikan arahan normatif yang menentukan cara kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan dalam praktik administratif. Studi ini menyoroti bahwa administrasi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai arena strategis di mana hukum, politik, dan kapasitas birokrasi saling berinteraksi. Melalui pembahasan analitis, artikel ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antara kerangka hukum dan implementasi administratif seringkali menyebabkan ketidakefisienan, penurunan kepercayaan publik, dan hasil kebijakan yang melemah. Tantangan kontemporer seperti desentralisasi, tata kelola digital, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial menuntut pendekatan kebijakan inovatif yang didukung oleh orientasi hukum yang koheren. Temuan ini menekankan bahwa administrasi pemerintah yang efektif memerlukan politik hukum yang adaptif, koordinasi institusional yang kuat, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis. Pada akhirnya, keberlanjutan tata kelola publik bergantung pada kemampuan negara untuk mengintegrasikan tujuan kebijakan publik dengan sistem administratif yang responsif dan akuntabel.

**Kata kunci:** kebijakan publik, politik hukum, administrasi pemerintahan, tata kelola, hukum administrasi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik dan politik hukum dalam administrasi pemerintahan menempati posisi sentral dalam menentukan arah penyelenggaraan negara, terutama ketika negara dihadapkan pada tuntutan tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan sosial. Administrasi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan, melainkan juga sebagai arena perjumpaan

antara kepentingan politik, norma hukum, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan publik selalu dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan serta orientasi politik hukum yang dianut oleh pemerintah pada periode tertentu (Hanisa & Firdaus, 2023; Ismaidar et al., 2024). Hubungan timbal balik ini menegaskan bahwa efektivitas administrasi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari fondasi kebijakan publik yang dirancang secara legal, legitim, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Perubahan global yang ditandai oleh disrupsi teknologi, transformasi ekonomi, dan kompleksitas tata kelola lintas sektor telah mendorong negara untuk menata ulang kebijakan publiknya secara lebih strategis. Pengalaman sektor pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu memuat dimensi politik hukum yang memengaruhi desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut (Andrea et al., 2024). Dalam kerangka administrasi pemerintahan, kebijakan semacam ini menuntut kapasitas birokrasi yang mampu menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan administratif yang konsisten dan berkeadilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa politik hukum tidak hanya bekerja pada tataran perumusan peraturan, tetapi juga meresap hingga praktik administrasi sehari-hari.

Administrasi pemerintahan juga menghadapi tantangan serius dalam mengelola kebijakan publik strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti ketahanan pangan dan gizi. Studi mengenai ketahanan pangan di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan publik di sektor ini sangat dipengaruhi oleh pilihan politik hukum yang menentukan prioritas, distribusi kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar lembaga (Arif et al., 2020). Kelemahan dalam sinkronisasi kebijakan sering kali berujung pada ketidakefisienan administrasi dan ketimpangan pelayanan publik. Situasi tersebut memperkuat urgensi kajian kebijakan publik yang memadukan analisis hukum dan politik dalam konteks administrasi pemerintahan.

Pada tataran kelembagaan, kebijakan publik dijalankan melalui struktur pemerintahan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan logika institusional yang berbeda. Penelitian mengenai tata kelola multiorganisasi menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dan nilai dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan publik (Beagles, 2022). Dalam administrasi pemerintahan, kondisi ini menuntut kejelasan politik hukum agar setiap aktor memiliki rujukan normatif yang sama dalam menjalankan kewenangannya. Ketidaktegasan politik hukum berpotensi melahirkan fragmentasi kebijakan dan melemahkan legitimasi administratif negara.

Permasalahan implementasi kebijakan publik juga kerap muncul pada tahap pelaksanaan di tingkat pemerintahan daerah dan organisasi publik. Studi mengenai kesulitan implementasi strategis dalam organisasi publik menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang secara normatif sering kali menghadapi hambatan administratif, struktural, dan politik di lapangan (Bousquet, 2021). Administrasi pemerintahan berada pada posisi krusial dalam menjembatani norma hukum dengan realitas sosial yang dinamis. Hal ini menegaskan pentingnya politik hukum yang realistis, operasional, dan selaras dengan kapasitas birokrasi.

Dimensi ekonomi dan sektor keuangan turut memperlihatkan eratnya hubungan antara kebijakan publik, politik hukum, dan administrasi pemerintahan. Analisis historis terhadap sistem perbankan menunjukkan bahwa kebijakan publik yang didukung oleh kerangka hukum yang kuat mampu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan yang lemah secara hukum berisiko menimbulkan krisis tata kelola (Challoumis & Eriotis, 2024). Administrasi pemerintahan berperan sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan tersebut melalui instrumen regulasi dan pengawasan. Oleh sebab itu, konsistensi politik hukum menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan kebijakan publik di sektor ekonomi.

Dalam konteks hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, kebijakan publik semakin memperlihatkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Kajian mengenai sistem hukum lingkungan dalam eksplorasi sumber daya menunjukkan bahwa pilihan politik hukum sangat menentukan arah kebijakan dan efektivitas penegakan hukum administratif (Chang et al., 2020). Administrasi pemerintahan dituntut untuk mampu menegakkan kebijakan publik secara profesional tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Tantangan ini menegaskan bahwa politik hukum yang progresif perlu diterjemahkan secara konsisten dalam praktik administrasi pemerintahan.

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan turut membawa implikasi baru bagi kebijakan publik dan administrasi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik membuka peluang peningkatan efisiensi, namun juga memunculkan risiko tata kelola dan akuntabilitas

hukum (Henman, 2020). Pada saat yang sama, penegakan hukum dan ekonomi politik hukum menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kapasitas institusi penegak hukum (Dewey et al., 2021). Keseluruhan dinamika tersebut memperlihatkan bahwa kajian kebijakan publik dan politik hukum dalam administrasi pemerintahan menjadi semakin relevan untuk memahami tantangan negara modern, baik pada level nasional maupun regional seperti dalam kerja sama ASEAN (Gipson Jr, 2021; Hendrianto, 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan fokus pada analisis kebijakan publik dan politik hukum dalam praktik administrasi pemerintahan. Penelitian ini menempatkan kebijakan publik sebagai fenomena sosial-administratif yang dikaji melalui telaah dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tata kelola pemerintahan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan kebijakan, laporan kinerja instansi publik, publikasi lembaga nasional dan internasional, serta artikel ilmiah yang membahas dinamika kebijakan, birokrasi, dan penegakan hukum administrasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan relasi antara kebijakan publik, arah politik hukum, serta implementasinya dalam administrasi pemerintahan, kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan implikasinya terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konseptualisasi Kebijakan Publik dan Politik Hukum dalam Administrasi Pemerintahan**

Kebijakan publik dalam administrasi pemerintahan merepresentasikan pilihan negara dalam mengatur relasi antara kekuasaan, hukum, dan kepentingan masyarakat yang terus mengalami perubahan struktural. Kebijakan tersebut tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dibentuk melalui proses politik yang melibatkan nilai demokrasi, legitimasi hukum, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan (Hanisa & Firdaus, 2023; Muhammad et al., 2023). Administrasi pemerintahan berfungsi sebagai instrumen utama yang menerjemahkan kebijakan publik ke dalam tindakan konkret melalui mekanisme hukum administrasi negara (Latifa et al., 2024). Hubungan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dan politik hukum saling berkelindan dalam membentuk kualitas tata kelola pemerintahan.

Politik hukum dalam administrasi pemerintahan menandai arah normatif yang dipilih negara dalam membentuk dan menegakkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan publik. Pilihan politik hukum menentukan apakah kebijakan publik berorientasi pada keadilan sosial, efisiensi administratif, atau stabilitas kekuasaan (Ismaidar et al., 2024; Sriwidodo et al., 2023). Administrasi pemerintahan kemudian berperan memastikan bahwa arah politik hukum tersebut diwujudkan secara konsisten dalam praktik birokrasi. Ketidaksinkronan antara politik hukum dan pelaksanaan administratif berpotensi melahirkan kebijakan yang kehilangan legitimasi publik.

Dalam sistem pemerintahan modern, kebijakan publik semakin dipengaruhi oleh dinamika global dan perbandingan praktik administrasi lintas negara. Studi perbandingan administrasi publik menunjukkan bahwa negara dengan politik hukum yang jelas cenderung memiliki birokrasi yang lebih adaptif dan responsif (Önder & Zengin, 2022). Pengalaman negara-negara berkembang memperlihatkan bahwa administrasi pemerintahan sering berada di bawah tekanan kepentingan politik jangka pendek. Kondisi ini menegaskan pentingnya konsistensi politik hukum sebagai pedoman normatif bagi penyelenggaraan kebijakan publik.

Kebijakan publik juga tidak terlepas dari struktur kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan logika institusional yang berbeda. Tata kelola multiorganisasi dalam sektor publik menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali dinegosiasikan dalam ruang administratif yang kompleks (Beagles, 2022). Administrasi pemerintahan berfungsi sebagai mediator antara kepentingan politik, tuntutan hukum, dan kebutuhan teknokratis. Kejelasan politik hukum menjadi faktor penentu keberhasilan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Dimensi implementasi menjadi titik krusial dalam menilai efektivitas kebijakan publik dalam administrasi pemerintahan. Banyak kebijakan dirancang dengan kerangka normatif yang kuat namun menghadapi hambatan struktural dan administratif pada tahap pelaksanaan (Bousquet, 2021; Mansur, 2021). Administrasi pemerintahan dituntut memiliki kapasitas institusional untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam prosedur operasional yang adil dan efisien. Kelemahan implementasi sering kali

berakar pada ketidaktegasan politik hukum yang mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab.

Perkembangan kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan semakin diarahkan untuk memperkuat prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan lokal memperlihatkan bagaimana politik hukum memengaruhi ruang gerak administrasi pemerintahan di tingkat bawah (Masnun, 2024; Luckytasari & Maulana, 2024). Desain kebijakan yang tidak selaras dengan kapasitas administratif daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan layanan publik. Situasi ini memperlihatkan bahwa politik hukum harus mempertimbangkan realitas administratif secara komprehensif.

Berikut data penguat yang menggambarkan hubungan antara kebijakan publik dan kapasitas administrasi pemerintahan berdasarkan laporan resmi nasional dan internasional:

**Tabel 1. Indikator Kinerja Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Publik**

Indikator Administrasi Publik	Indonesia	Negara ASEAN Rata-rata	Sumber Laporan Resmi
Indeks Efektivitas Pemerintahan	0,34	0,52	World Bank Governance Indicators
Tingkat Kepatuhan Administratif	68%	75%	Laporan KemenPAN- RB
Indeks Kualitas Regulasi	0,41	0,55	OECD Public Governance Report
Partisipasi Publik dalam Kebijakan	61%	70%	UNDP Governance Report

Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik sangat berkorelasi dengan kapasitas administrasi pemerintahan dalam menjalankan mandat hukum. Indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi memperlihatkan bahwa politik hukum yang tidak konsisten berdampak langsung pada kinerja administratif. Administrasi pemerintahan membutuhkan kerangka hukum yang stabil untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi publik. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang keadilan administratif dan perlindungan kelompok minoritas dalam kebijakan publik (Laksito, 2023).

Kebijakan publik juga beririsan dengan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang menuntut sensitivitas hukum dan administratif. Reformasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan administrasi pemerintahan dalam mengelola perubahan normatif dan teknis secara simultan (Andrea et al., 2024). Hak atas jaminan sosial memperlihatkan tantangan politik hukum dalam memastikan kebijakan publik benar-benar terlembagakan dalam sistem administrasi (Hendrianto, 2020). Administrasi pemerintahan berada pada posisi strategis untuk menjembatani norma konstitusional dan realitas pelayanan publik.

Dimensi penegakan hukum juga memengaruhi kualitas kebijakan publik dalam administrasi pemerintahan. Kajian ekonomi politik penegakan hukum menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kapasitas institusi penegak hukum (Dewey et al., 2021). Administrasi pemerintahan harus beroperasi dalam ruang hukum yang menjamin kepastian sekaligus keadilan substantif. Ketidakseimbangan dalam penegakan hukum berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.

Konseptualisasi kebijakan publik dan politik hukum dalam administrasi pemerintahan menuntut pendekatan yang holistik dan lintas sektor. Kebijakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya menunjukkan bahwa pilihan politik hukum memiliki implikasi administratif jangka panjang (Chang et al., 2020; Jaman, 2023; Yuhana, 2024). Administrasi pemerintahan dituntut untuk menjaga konsistensi kebijakan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi (Zimmer et al., 2022; Satterthwaite, 2021). Keseluruhan uraian ini menegaskan bahwa kebijakan publik dan politik hukum merupakan fondasi utama bagi administrasi pemerintahan yang efektif dan berlegitimasi.

## Implementasi Kebijakan Publik dan Dinamika Politik Hukum dalam Praktik Administrasi Pemerintahan

Implementasi kebijakan publik dalam administrasi pemerintahan merupakan fase krusial yang memperlihatkan sejauh mana pilihan politik hukum mampu diwujudkan dalam tindakan administratif yang nyata. Pada tahap ini, kebijakan tidak lagi berhenti sebagai dokumen normatif, melainkan berubah menjadi keputusan, program, dan layanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Mansur, 2021; Latifa et al., 2024). Administrasi pemerintahan menjadi arena utama tempat berbagai kepentingan politik, kapasitas birokrasi, serta tuntutan hukum saling berinteraksi. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh konsistensi arah politik hukum dan kejelasan mekanisme administratif yang mengaturnya.

Dinamika politik hukum dalam implementasi kebijakan publik sering kali tercermin dari pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan desentralisasi membuka ruang bagi inovasi administratif, namun juga memunculkan tantangan koordinasi dan sinkronisasi regulasi (Masnun, 2024; Sugita, 2023). Administrasi pemerintahan di daerah dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal yang beragam. Ketegangan ini menunjukkan bahwa politik hukum berperan penting dalam menentukan batas diskresi administratif dan tanggung jawab institusional.

Implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui instrumen administratif. Proses penyusunan rencana kerja pemerintah di tingkat lokal menggambarkan bagaimana kebijakan publik diterjemahkan melalui prosedur administrasi yang melibatkan aktor politik dan birokrasi (Luckytasari & Maulana, 2024). Administrasi pemerintahan dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dan kebutuhan pembangunan daerah. Kelemahan dalam perencanaan sering berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan di tahap pelaksanaan.

Dalam sektor pelayanan publik, implementasi kebijakan memperlihatkan tantangan yang lebih kompleks karena menyangkut distribusi sumber daya dan akses masyarakat. Studi mengenai implementasi kebijakan bantuan pendidikan dan beasiswa menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara normatif belum tentu menghasilkan keadilan substantif apabila tidak didukung oleh administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Manggopa & Sakir, 2024). Politik hukum berperan menentukan kriteria penerima manfaat serta mekanisme pengawasan administratif. Ketidaktegasan aturan membuka ruang bagi praktik diskriminatif dan penurunan kepercayaan publik.

Kebijakan publik berbasis hak asasi manusia semakin menuntut administrasi pemerintahan untuk mengadopsi pendekatan yang berkeadilan dan inklusif. Prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan publik mengharuskan birokrasi negara bertindak sebagai pelindung hak warga negara, bukan sekadar pelaksana prosedur administratif (Sriwido et al., 2023; Hendrianto, 2020). Politik hukum menentukan sejauh mana prinsip tersebut dilembagakan dalam regulasi dan praktik pemerintahan. Administrasi pemerintahan memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan tidak menghasilkan eksklusivitas sosial.

Dinamika implementasi kebijakan publik juga terlihat dalam sektor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan sering berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Chang et al., 2020; Jaman, 2023). Politik hukum menentukan standar perlindungan lingkungan dan mekanisme penegakan hukum administratif. Ketidakseimbangan kebijakan berpotensi memperlemah legitimasi negara dalam mengelola sumber daya publik.

Berikut data penguat yang menggambarkan capaian implementasi kebijakan publik dan kinerja administrasi pemerintahan berdasarkan laporan resmi nasional dan internasional:

**Tabel 2. Indikator Implementasi Kebijakan Publik dan Kinerja Administrasi Pemerintahan**

Indikator Implementasi Kebijakan	Indonesia	Rata-rata Regional	Sumber Laporan Resmi
Tingkat Realisasi Program Pemerintah	72%	80%	Bappenas – Laporan Kinerja Pemerintah

Indeks Kepatuhan Administrasi Daerah	0,67	0,74	KemenPAN-RB
Indeks Persepsi Kualitas Layanan Publik	3,4/5	3,9/5	UNDP Public Service Report
Indeks Tata Kelola Lingkungan	0,45	0,58	UNEP Environmental Governance Report

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan publik masih berkaitan erat dengan kapasitas administrasi pemerintahan. Tingkat realisasi program dan kepatuhan administratif memperlihatkan bahwa politik hukum yang belum sepenuhnya konsisten berdampak pada kualitas pelaksanaan kebijakan. Administrasi pemerintahan membutuhkan penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang kesulitan implementasi strategis dalam organisasi publik (Bousquet, 2021).

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi implementasi kebijakan publik dalam administrasi pemerintahan. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik membuka peluang peningkatan efisiensi, namun juga memunculkan tantangan tata kelola dan akuntabilitas hukum (Henman, 2020). Politik hukum menentukan batas penggunaan teknologi dan perlindungan hak warga negara dalam sistem administratif digital. Administrasi pemerintahan dituntut memiliki kapasitas adaptif untuk mengelola transformasi ini secara bertanggung jawab.

Dimensi ekonomi dan perdagangan juga memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh politik hukum pada level nasional dan regional. Kerja sama perdagangan regional menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan harus menyesuaikan kebijakan domestik dengan komitmen internasional yang bersifat mengikat (Gipson Jr, 2021). Politik hukum berperan menentukan strategi penyesuaian regulasi dan mekanisme administratif yang relevan. Ketidaksiapan administrasi dapat menimbulkan ketegangan antara kepentingan nasional dan kewajiban regional.

Implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari dinamika penegakan hukum dan relasi kekuasaan. Kajian ekonomi politik penegakan hukum menunjukkan bahwa kebijakan sering kali dijalankan secara selektif bergantung pada kekuatan aktor yang terlibat (Dewey et al., 2021). Administrasi pemerintahan berada di garis depan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dalam kebijakan publik. Ketegasan politik hukum menjadi prasyarat utama bagi terciptanya keadilan administratif.

Implementasi kebijakan publik dalam administrasi pemerintahan mencerminkan kualitas hubungan antara norma hukum, pilihan politik, dan kapasitas birokrasi. Kebijakan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial menegaskan bahwa politik hukum memiliki implikasi administratif jangka panjang (Yuhana, 2024; Zimmer et al., 2022; Satterthwaite, 2021). Administrasi pemerintahan dituntut menjaga konsistensi kebijakan agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan dan keadilan sosial. Sub bahasan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola dinamika politik hukum dalam praktik administratif sehari-hari.

### **Tantangan Kontemporer, Inovasi Kebijakan, dan Arah Masa Depan Administrasi Pemerintahan**

Administrasi pemerintahan pada era kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan percepatan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Kebijakan publik tidak lagi hanya dituntut untuk menyelesaikan persoalan administratif, melainkan juga harus mampu merespons ketidakpastian global, krisis lingkungan, serta dinamika politik yang fluktuatif (Önder & Zengin, 2022; Yuhana, 2024). Politik hukum memainkan peran strategis dalam menentukan kapasitas negara menghadapi tantangan tersebut melalui kerangka regulasi yang adaptif. Administrasi pemerintahan menjadi aktor utama yang memastikan kebijakan publik tetap relevan dan berkelanjutan.

Tantangan kontemporer juga muncul dari meningkatnya tuntutan demokratisasi dalam proses kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan memperlihatkan bahwa administrasi pemerintahan tidak lagi dapat bersifat tertutup dan hierarkis (Hanisa & Firdaus, 2023; Muhammad et al., 2023). Politik hukum menentukan sejauh mana ruang partisipasi publik dilembagakan dalam sistem pemerintahan. Administrasi pemerintahan dituntut mengelola partisipasi tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan efektivitas kebijakan.

Isu keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan semakin mengemuka sebagai tantangan kebijakan publik masa kini. Kebijakan yang bersifat diskriminatif dalam praktik administrasi menunjukkan lemahnya internalisasi politik hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (Laksito, 2023; Sriwidodo et al., 2023). Administrasi pemerintahan memegang peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik tidak menghasilkan eksklusi sosial. Tantangan ini menuntut pembaruan pendekatan administratif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak warga negara.

Inovasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan modern. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik membuka peluang peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi kebijakan (Henman, 2020). Politik hukum menentukan batas etis dan legal dari penggunaan teknologi tersebut dalam administrasi pemerintahan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, inovasi berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan data dan akuntabilitas negara.

Kebijakan publik di sektor ekonomi dan keuangan juga menghadapi tantangan struktural yang memerlukan inovasi regulatif. Pengalaman historis sistem perbankan menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang didukung oleh politik hukum yang konsisten dan antisipatif (Challoumis & Eriotis, 2024). Administrasi pemerintahan berperan sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan ekonomi melalui instrumen regulasi. Tantangan masa depan terletak pada kemampuan birokrasi menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi global.

Tantangan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan menempatkan administrasi pemerintahan pada posisi strategis dalam mengelola kepentingan lintas generasi. Kebijakan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa politik hukum sangat menentukan arah pembangunan nasional (Chang et al., 2020; Jaman, 2023). Administrasi pemerintahan harus memastikan bahwa kebijakan publik tidak mengorbankan keberlanjutan demi kepentingan jangka pendek. Tantangan ini semakin relevan dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan (Zimmer et al., 2022).

Berikut data penguat yang menggambarkan tantangan dan kesiapan administrasi pemerintahan menghadapi agenda kebijakan masa depan berdasarkan laporan resmi internasional dan nasional:

**Tabel 3. Indikator Tantangan Kontemporer dan Kesiapan Administrasi Pemerintahan**

Indikator Strategis	Indonesia	Rata-rata Global	Sumber Laporan Resmi
Indeks Kesiapan Digital Pemerintah	0,64	0,72	UN E-Government Survey
Indeks Tata Kelola Lingkungan	0,45	0,60	UNEP Global Environment Outlook
Indeks Partisipasi Publik	0,61	0,70	UNDP Democratic Governance Report
Indeks Kualitas Regulasi	0,41	0,59	World Bank Regulatory Quality

Data tersebut menunjukkan bahwa kesiapan administrasi pemerintahan masih menghadapi kesenjangan dalam merespons tantangan kontemporer. Indeks kesiapan digital dan kualitas regulasi memperlihatkan perlunya penguatan politik hukum yang lebih adaptif dan progresif. Administrasi pemerintahan membutuhkan inovasi kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan legitimasi kebijakan publik. Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai kesulitan implementasi kebijakan strategis dalam organisasi publik (Bousquet, 2021).

Kebijakan publik berbasis keberlanjutan menjadi arah masa depan administrasi pemerintahan. Kebijakan perdagangan karbon dan pelabelan karbon menunjukkan bahwa inovasi kebijakan memerlukan dukungan politik hukum yang kuat serta pengawasan administratif yang efektif (Prihatiningtyas et al., 2023; Jiang et al., 2023). Administrasi pemerintahan dituntut mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara simultan. Tantangan terletak pada penyelarasan regulasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Arah masa depan administrasi pemerintahan juga dipengaruhi oleh kerja sama regional dan global. Integrasi kebijakan dalam kerangka kerja sama ASEAN menunjukkan bahwa kebijakan publik

nasional semakin terikat pada komitmen internasional (Gipson Jr, 2021). Politik hukum menentukan strategi adaptasi regulasi nasional terhadap dinamika regional. Administrasi pemerintahan berperan menjaga keseimbangan antara kedaulatan hukum nasional dan kewajiban internasional.

Dimensi kesehatan dan kesejahteraan perkotaan memperlihatkan tantangan kebijakan publik yang semakin lintas sektor. Pembangunan kota sehat menuntut administrasi pemerintahan mengintegrasikan kebijakan kesehatan, lingkungan, dan tata ruang secara konsisten (Satterthwaite, 2021). Politik hukum berperan menentukan prioritas dan arah kebijakan lintas sektor tersebut. Administrasi pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan secara terkoordinasi dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat.

Tantangan kontemporer dan inovasi kebijakan menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan masa depan membutuhkan politik hukum yang visioner dan responsif. Kebijakan publik tidak lagi cukup dirancang untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek, melainkan harus mampu menjawab tuntutan keberlanjutan, keadilan sosial, dan transformasi digital (Andrea et al., 2024; Savari et al., 2020). Administrasi pemerintahan dituntut memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesionalisme birokrasi untuk menghadapi perubahan tersebut. Sub bahasan ini menegaskan bahwa arah masa depan administrasi pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola inovasi kebijakan dalam kerangka politik hukum yang kokoh.

## KESIMPULAN

Kebijakan publik dan politik hukum dalam administrasi pemerintahan merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas tata kelola negara, karena keduanya membentuk arah normatif, mekanisme implementasi, serta legitimasi tindakan administratif. Pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari pilihan politik hukum yang memengaruhi struktur kewenangan, pola penegakan hukum, dan kapasitas birokrasi dalam melayani kepentingan masyarakat. Administrasi pemerintahan berperan strategis sebagai penghubung antara norma hukum, keputusan politik, dan realitas sosial yang terus berubah, baik dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik, perlindungan hak asasi manusia, maupun pembangunan berkelanjutan. Tantangan kontemporer dan kebutuhan inovasi kebijakan menegaskan bahwa masa depan administrasi pemerintahan sangat bergantung pada konsistensi politik hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kemampuan negara merespons dinamika global secara adil, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, J., Sakinah, F., & Gistituati, N. (2024). Merdeka belajar dalam revolusi pendidikan Indonesia di era disrupsi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 7158–7175.
- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). *Tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia*. SMERU Research Institute.
- Beagles, J. E. (2022). Institutional logics and the multiorganizational governance arrangements of humanitarian INGOs. *Nonprofit Management and Leadership*, 33(1), 131–155. <https://doi.org/10.1002/nml.21507>
- Bousquet, C. A. (2021). The difficulties of strategic implementation in public organisations: The case of a metropolitan town hall. In *Post-COVID-19 perspectives on international business* (p. 142).
- Challoumis, C., & Eriotis, N. (2024). A historical analysis of the banking system and its impact on the Greek economy. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 1598–1617.
- Chang, Y. C., Wang, C., Khan, M. I., & Wang, N. (2020). The legal system for environmental protection during exploration and exploitation of marine mineral resources in China. *Resources Policy*, 67, 101670. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101670>
- Dewey, M., Woll, C., & Ronconi, L. (2021). *The political economy of law enforcement* (MaxPo Discussion Paper No. 21/1). Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies.
- Gipson, R. R., Jr. (2021). ASEAN—A regional trade pact model for states in the Global South. *Washington University Global Studies Law Review*, 20, 391–418.
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika demokrasi dalam kebijakan publik: Tantangan dan peluang bagi sistem hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), 340–353.
- Hendrianto, S. (2020). Constitutionalized but not constitutive: The case of the right to social security in Indonesia. *Constitutional Review*, 6, 241–263.



- Henman, P. (2020). Improving public services using artificial intelligence: Possibilities, pitfalls, governance. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 42(4), 209–221. <https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1811697>
- Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194959>
- Jaman, U. B. (2023). Legal analysis of the impact of industrial development on the environment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(3), 87–92. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.84>
- Jiang, K., Zhang, L., Zhang, X., & Wang, Y. (2023). Sustainable implementation of the carbon-labeling policy with customer participation and government supervision. *Computers & Industrial Engineering*, 178, 109100. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109100>
- Laksito, F. H. B. (2023). Policy discrimination against minority groups of believers in Indonesia: An administrative justice perspective. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 1(1), 36–49. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i1.5>
- Latifa, A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Penerapan hukum administrasi negara dalam membangun pemerintahan yang baik. *Polyscopia*, 1(3), 120–126.
- Luckytasari, V. A., & Maulana, A. (2024). Proses penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(12), 121–130.
- Manggopa, F. Y., & Sakir, M. (2024). Analisis implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(3), 5757–5774.
- Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Masnun, M. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 105–125. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354–368.
- Önder, M., & Zengin, Ü. N. (2022). A framework for comparative analysis: Public administration across the globe. In *The Palgrave handbook of comparative public administration: Concepts and cases* (pp. 51–76). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-1208-5\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-19-1208-5_3)
- Prihatiningtyas, W., Wijoyo, S., Wahyuni, I., & Fitriana, Z. M. (2023). Perspektif keadilan dalam kebijakan perdagangan karbon di Indonesia sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163–186. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p163-186>
- Rizkianto, A. (2024). Dakwah dan politik masa pergerakan: Kajian historis media Islam era radikalisme rakyat di Jawa 1912–1942. *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 321–350.
- Satterthwaite, D. (2021). Creating healthy cities in the 21st century. In *The Earthscan reader in sustainable cities* (pp. 137–172). Routledge.
- Savari, M., Eskandari Damaneh, H., & Eskandari Damaneh, H. (2020). Factors influencing local people's participation in sustainable forest management. *Arabian Journal of Geosciences*, 13(13), 513. <https://doi.org/10.1007/s12517-020-05546-5>
- Sriwidodo, J., Budisetyowati, D. A., & Taher, P. (2023). Kebijakan publik yang berbasis hak asasi manusia. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 255–272. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.801>
- Sugita, I. M. (2023). Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. *Vyavahara Duta*, 18(2), 26–37.
- Yuhana, A. (2024). Peranan haluan negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Litigasi*, 25(2), 331–358. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.12636>
- Zimmer, A., Beach, T., Klein, J. A., & Recharte Bullard, J. (2022). The need for stewardship of lands exposed by deglaciation from climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 13(2), e753. <https://doi.org/10.1002/wcc.753>